

PROBLEMATIK PELAKSANAAN PEMBELAJARAN *HYBRID LEARNING* PADA MATA PELAJARAN PPKn DI SMA NEGERI 16 SURABAYA

Hesti Veronica Putri

(PPKn, FISH, UNESA) hestivero10@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

(PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* merupakan pengalaman baru di SMA Negeri 16 Surabaya. Dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* bukanlah sebuah hal yang mudah dilaksanakan dalam sebuah pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memunculkan problematik yang terjadi pada aktor pembelajar, yaitu guru dan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematik yang dihadapi oleh peserta didik dan guru mata pelajaran PPKn dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi (*mixed method*) dengan tipe *Sequential Exploratory Design*. Responden dalam penelitian ini adalah 3 guru mata pelajaran PPKn dan 90 peserta didik dari kelas X MIPA 2, XI MIPA 7, dan XII MIPA 4 SMA Negeri 16 Surabaya dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara pada 3 guru PPKn dan kuesioner yang dibagikan kepada 90 peserta didik. Hasil penelitian yang diperoleh terdapat problematik yang dialami oleh guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya yaitu terdapat kendala teknis, seperti (1) Kurangnya pemahaman guru dalam bidang teknologi; (2) Kualitas aplikasi *microsoft teams* kurang baik; (3) Terkendala jaringan internet. Hal ini menyebabkan kendala psikologis pada guru dan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam fokus pembelajaran, sehingga dapat menyebabkan kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik.

Kata Kunci: Problematik, *Hybrid Learning*, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Abstract

The implementation of hybrid learning is a new experience at state 16 senior high school of Surabaya. In the implementation of hybrid learning is not an easy thing to implement in a lesson, so that in its implementation it can bring up problems that occur in learning actors, namely teachers and students. This study aims to determine the problems faced by students and teachers of Civics in the implementation of hybrid learning at state 16 senior high school of Surabaya. The research method used is a combination research method (mixed method) with the type of Sequential Exploratory Design. The respondents in this study were 3 teachers of Civics and 90 students from class grade ten of math and science 2, grade eleven of math and science 7, and grade twelve of math and science 4 at state 16 senior high school of Surabaya with data collection techniques through observation, structured interviews with 3 Pancasila and civic education teachers and questionnaires distributed to 90 learners. The results obtained, that there are problems experienced by teachers and students in the implementation of hybrid learning on Civics subjects at state 16 senior high school of Surabaya, namely there are technical obstacles, such as (1) Lack of understanding of teachers in the field of technology; (2) Quality of Microsoft Teams is not good; (3) Constrained by internet network. This causes psychological constraints on teachers and students who have difficulty in focusing on learning, so that it can lead to a lack of interaction between teachers and students.

Keywords: Problematics, *Hybrid Learning*, Pancasila and Civic Education.

PENDAHULUAN

Di akhir tahun 2019, terdapat virus yang menggemparkan dunia yaitu *Corona Virus Disease 2019* atau dikenal dengan Covid-19. Covid-19 adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Hal ini menjadi bencana alam di dunia, sehingga terdapat perubahan besar dalam globalisasi. Covid-19 memberikan dampak pada kehidupan dalam berbagai bidang, yaitu diantaranya dalam bidang sosial, kesehatan, dan ekonomi, termasuk dalam bidang pendidikan. Covid-19 masuk di Indonesia pada awal tahun 2020, dengan demikian dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran Covid-19,

pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19 (Kemendikbud, 2020).

Adapun Surat Edaran berisikan pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau dengan sistem dalam jaringan (*Daring*). Hal ini menyebabkan pendidikan di Indonesia berbeda dengan pembelajaran sebelumnya, bahwasannya kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka oleh guru dan peserta didik. Adanya Covid-19 yang berdampak pada bidang

pendidikan menyebabkan pembelajaran untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan secara tatap muka, hal ini bertujuan untuk memutus penyebaran Covid-19.

Adanya pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan secara daring, hal ini membuat perubahan yang global dalam bidang pendidikan guna bertujuan supaya pembelajaran tetap harus dilaksanakan, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang menerapkan sistem pendidikan nasional dengan program wajib belajar 12 tahun sesuai dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 (P. RI, 2003). Pembelajaran jarak jauh yaitu sebuah pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai bentuk hubungan interaksi oleh guru dan peserta didik. Pembelajaran *e-learning* dapat dijadikan solusi pembelajaran dalam bidang teknologi yang dimanfaatkan sebagai akibat dari perkembangan zaman, seperti bencana Covid-19.

Dalam pelaksanaan pembelajaran daring memberikan pengalaman baru bagi pelaksana kegiatan belajar mengajar, dimana peserta didik dan guru disebut sebagai aktornya. Dengan demikian, guru dituntut untuk memberikan materi pembelajaran secara *virtual* dan peserta didik dituntut dapat memahami materi pembelajaran yang telah diberikan. Dalam pelaksanaannya para aktor diharuskan untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran daring, seperti adanya laptop atau *handphone* dan kuota internet yang digunakan sebagai kebutuhan pokok dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Selain itu, peran orang tua yang harus mengontrol belajar anak. Dilihat dari hal ini, tidak semua orang tua dapat memiliki pemahaman materi peserta didik karena keterbatasannya pengetahuan yang dimiliki. Dengan demikian, tidak semua aktor kegiatan belajar mengajar dapat memenuhi syarat dalam mendukung pembelajaran daring, seperti keterbatasan memiliki sarana laptop atau *handphone*, kuota internet dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat menimbulkan adanya problematik yang terjadi pada pembelajaran daring atau jarak jauh.

Problematik pembelajaran adalah kesukaran atau hambatan yang menghalangi terjadinya belajar (Dimiyati & Mudjiono, 2010). Efrizal Nasution juga mengatakan adanya problematik pendidikan nasional dapat dilihat dari 2 hal yaitu (1) Adanya masalah kesenjangan sarana prasarana dan pemerataan pendidikan; (2) Adanya masalah kebijakan pendidikan yang terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi (Nasution, 2008). Maka dapat disimpulkan bahwa problematik dalam sebuah pembelajaran dapat terjadi dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan.

Dalam realisasi pengimplementasian kebijakan yang telah diterapkan, sangat digantungkan oleh tercapainya suatu kebijakan, seperti pemerintah dapat menyiapkan bantuan perangkat digital, kuota dan koneksi jaringan internet yang lancar dan stabil guna meminimalisir ketimpangan akses di berbagai daerah. Adanya fungsi implementasi kebijakan menurut Wahab yaitu untuk menciptakan suatu hubungan yang memiliki kemungkinan bahwa suatu tujuan kebijakan dapat terwujud sebagai *outcome* atau hasil akhir dari kegiatan yang dilaksanakan

oleh pemerintah (Wahab, 2008). Adanya fungsi implementasi mencakup penerusan dalam ilmu kebijakan (*policy science*) sehingga disebut dengan "*Policy Delivery System*" (sistem penyampaian penerusan kebijakan). *Policy delivery system* diartikan sebagai sistem penyampaian penerusan kebijakan. Dalam penelitian ini, *policy delivery system* di dalam suatu kebijakan harus dapat menerima pendapat dari adanya kebijakan sekolah, dimana guru dan peserta didik disebut sebagai aktornya, sehingga konteks *delivery* disini adalah menyampaikan.

Adapun realisasi teori *policy delivery system* dalam pembelajaran yang dilakukan memiliki aspek-aspek yang dapat mempengaruhi jaringan kerja pada kebijakan penelitian ini yaitu (1) Kewenangan atau struktur birokrasinya adalah pemerintah yaitu Kemendikbud yang mengeluarkan suatu kebijakan pendidikan; (2) Komunitas yaitu masyarakat yang berarti sekolah, guru dan peserta didik sebagai aktor dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan instruksi birokrasi. Adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi dan dilaksanakan oleh aktor kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat terlaksananya pembelajaran, dalam penelitian ini terciptanya pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Setelah pelaksanaan, dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pembelajaran dapat dilakukan dengan baik atau terdapat hambatan dan problematik yang terjadi, sehingga jika pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Maka suatu tujuan pembelajaran dapat tercapai. Namun, jika diketahui terdapat problematik yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* baik dari aktor kegiatan belajar mengajar maupun dari kendala lainnya.

Seiring dengan berjalannya waktu dan memperhatikan kondisi yang berkembang saat ini, bahwa Covid-19 sudah mulai mereda dan teratasi. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, level 3, dan level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali (M. D. N. RI, 2021). Berdasarkan kriteria level kondisi pandemi terkait asesmen dalam memenuhi kebutuhan untuk terlaksananya kebijakan dari Inmendagri tentang pembatasan kegiatan masyarakat berbasis level 3, level 2, dan level 1 serta pengoptimalan dalam penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan guna pencegahan penyebaran Covid-19, sehingga disebutkan bahwa pembelajaran yang berada di satuan pendidikan level tiga dapat dilaksanakan berdasarkan syarat yang ditetapkan. Dengan begitu, kebijakan pembelajaran *hybrid learning* dapat dijadikan sebagai sebuah solusi pembelajaran dari problematik yang terjadi pada pelaksanaan pembelajaran daring yang dirancang untuk menggabungkan adanya pembelajaran tatap muka dengan teknologi internet atau komputer. *Hybrid learning* adalah suatu pembelajaran yang menyatukan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh dalam waktu yang bersamaan dan dilakukan secara efektif dan teratur (Verawati & Desprayoga, 2019).

Dengan adanya pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* terdapat pro dan kontra di masyarakat bahwa masyarakat khawatir jika pembelajaran dilaksanakan

dengan tatap muka dapat menyebabkan kelompok baru dalam penularan Covid-19 dikalangan pelajar. Dalam pembelajaran *hybrid learning* yang diterapkan, terdapat beberapa problematik muncul yang dirasakan oleh aktor kegiatan belajar mengajar dalam pelaksanaan pembelajarannya, seperti yang diterapkan oleh salah satu Sekolah Menengah Atas di wilayah Surabaya. Sesuai dengan Inmendagri Nomor 35 Tahun 2021 kepada Gubernur dan Walikota pada daerah kota dan kabupaten sesuai kriteria level tiga di Kota Surabaya dan salah satu sekolah yang ada di zona level tiga yang menggunakan sistem *hybrid learning* adalah SMA Negeri 16 Surabaya yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Berdasarkan arahan tersebut, SMA Negeri 16 Surabaya mengeluarkan Surat Edaran dengan Nomor 800/291/101.6.1.16/2021 yang menyebutkan bahwa (1) Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021, disebutkan bahwa pembelajaran di satuan pendidikan level satu hingga level tiga boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka; (2) SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19; (3) Pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) bahwa sekolah yang berada di daerah PPKM Level 1-3 boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas; (4) Arahan Gubernur Provinsi Jawa Timur bahwa bagi daerah yang masuk Level satu, level dua, dan level tiga dipersilahkan melakukan PTM terbatas.

Adanya pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya berlangsung selama tiga bulan yang dilakukan sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan 4 Desember 2021 dengan beberapa pertimbangan yang diputuskan oleh SMA Negeri 16 Surabaya dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Adapun pertimbangannya yaitu (1) SMA Negeri 16 Surabaya berada di Kota Surabaya yang saat ini telah berada pada level tiga; (2) Warga sekolah telah mendapatkan setidaknya vaksin dosis satu; (3) Sarana dan prasarana sekolah telah memenuhi kriteria pelaksanaan PTM terbatas; (4) Telah terbentuk Satgas Covid-19. Dengan adanya beberapa pertimbangan tersebut, maka terdapat aturan dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya, adapun aturannya yaitu (1) Jam pembelajaran dimulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB; (2) Peserta yang hadir dalam pembelajaran tatap muka (PTM) sebanyak 50% setiap hari dengan menerapkan pembagian Tim A dengan nomor absen awal dari 50% jumlah peserta didik seluruhnya pada setiap kelasnya, maka Tim B dengan nomor absen akhir dari 50% jumlah peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ); (3) Setiap hari Jumat, seluruh peserta didik melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dalam menjaga kemungkinan penularan Covid-19, maka SMA Negeri 16 Surabaya mengimbau kepada seluruh warga sekolah untuk menaati 5M protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer*, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas.

SMA Negeri 16 Surabaya menyediakan sarana aplikasi *microsoft teams* yang digunakan sebagai media

pembelajaran dalam pelaksanaan *hybrid learning*. Dilihat dari situasi dan kondisi saat ini, adanya aplikasi ini sangat dibutuhkan sebagai wadah atau media dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yang mampu membantu tenaga pengajar dalam menyampaikan materi kepada peserta didik baik dalam pembelajaran jarak jauh maupun dengan pembelajaran tatap muka. Namun, tidak semua pengajar dapat memahami teknologi yang ada. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi hambatan bagi tenaga pengajar khususnya yang sudah lanjut usia, dikarenakan minimnya pengetahuan tenaga pengajar yang lanjut usia dalam bidang teknologi.

Dengan adanya pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya, dapat diterapkan pembelajaran tatap muka (PTM) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan peserta didik yang hadir sebanyak 50% per kelas di tiap harinya dan masing-masing kelas memiliki pembagian jadwal peserta didik. Maka, dalam pelaksanaan pembelajarannya guru dituntut untuk dapat mengajar secara daring dan luring dalam satu waktu yang bersamaan. Ketika pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka, guru dapat mengajar seperti pada umumnya, sedangkan untuk pembelajaran jarak jauhnya guru menyampaikan materi melalui media pembelajaran yang disediakan oleh SMA Negeri 16 Surabaya yaitu *microsoft teams*.

Pembelajaran *hybrid learning* memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dari *hybrid learning* yaitu (1) Penggunaan teknologi sangat bermanfaat dan tidak terbatas waktu, sehingga peserta didik bebas untuk mengakses pembelajaran yang dibutuhkan melalui jaringan internet secara fleksibel; (2) Mendapatkan manfaat pembelajaran tatap muka (PTM) yang sulit didapat dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ); (3) Ruang kelas menjadi lebih fleksibel dan biaya lebih terjangkau karena tidak mengharuskan peserta didik untuk datang ke sekolah sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi; sedangkan kekurangan dalam pembelajaran *hybrid learning* yaitu (1) Keterbatasan dalam mengakses internet, dikarenakan kuota atau jaringan internet yang kurang stabil; (2) Peserta didik dapat belajar mandiri, namun peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam mengontrol belajar anak, dan mengharuskan orang tua untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran *hybrid learning*; (3) Jika peserta didik kurang bisa untuk belajar secara mandiri, maka dapat menimbulkan kemalasan dan kesulitan waktu dalam manajemen jadwal belajar anak; (4) Kurangnya interaksi antar teman, yang dapat menimbulkan peserta didik kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini secara tidak langsung hal tersebut juga dapat menimbulkan adanya komunikasi yang kurang efektif yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Dengan demikian, melalui kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran *hybrid learning* dapat diketahui bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan melalui pembelajaran *hybrid learning*.

Terlebih lagi dalam mata pelajaran yang sulit untuk dilaksanakan melalui pembelajaran *hybrid learning*. Menurut Tri Susilo berpendapat bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata

pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Tri Susilo Repository et al., 2021). Dalam pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa pembelajaran saat ini berpusat pada peserta didik, sehingga pada mata pelajaran PPKn difokuskan pada peserta didik untuk dapat melihat bagaimana implementasi atau perilaku yang diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada lingkungan sekolah. Dengan demikian, mata pelajaran PPKn merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan pada peserta didik guna menciptakan generasi muda yang memiliki moral, sikap dan kepribadian baik serta generasi muda yang mampu menjadi penerus bangsa yang paham akan kewarganegaraan Indonesia. Dalam pembelajaran tidak hanya diberikan melalui penjelasan materi saja, sebagai pengajar harus dapat mengetahui perilaku peserta didik apakah sesuai dengan nilai, norma, moral, sikap dan karakter baik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam penelitian ini setara dengan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Achmad Fanani dan Akhmad Qomaru Zaman yang merupakan Mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran *Blended Learning* Terhadap Hasil Belajar PPKn Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Sukodono”. Pada penelitian yang dilakukan terfokus pada hasil belajar mata pelajaran PPKn siswa kelas VII SMP Negeri 1 Sukodono, dalam sebuah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran *blended learning*, guna mengetahui apakah pembelajaran berpengaruh pada hasil belajar siswa dalam pemahaman materi PPKn. Dari hasil observasi penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa terdapat penerapan model pembelajaran *blended learning* yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar PPKn yang diketahui melalui peningkatan nilai hasil belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 1 Sukodono (Fanani & Zaman, 2021). Maka dalam penelitian ini, dapat ditindaklanjuti dengan adanya pembelajaran *hybrid learning* yang telah dilakukan di SMA Negeri 16 Surabaya dengan mengetahui problematik dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Dalam penelitian ini tidak lagi terfokus pada hasil belajar siswa, melainkan untuk mengetahui apakah terdapat problematik dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya.

Dengan adanya beberapa hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*, maka perlu diketahui masalah apa saja yang dihadapi. Dilihat dari dua sudut pandang antara guru dan peserta didik, apakah terdapat keselarasan atau tidak diantara problematik yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Dengan demikian, dapat dilakukan penelitian di SMA Negeri 16 Surabaya tentang “Problematik Pelaksanaan Pembelajaran *Hybrid Learning* Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya”. Dengan memperhatikan latar belakang dan studi penelitian pendahuluan yang ada, maka dapat dijelaskan bahwa problematik dalam

pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* pada mata pelajaran PPKn ini dapat dijadikan sebuah penelitian. Maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah bagaimana problematik yang dihadapi oleh peserta didik dan guru mata pelajaran PPKn dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematik yang dihadapi oleh peserta didik dan guru mata pelajaran PPKn terkait problematik dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya. Secara teoretis penelitian ini mempunyai manfaat, yaitu dapat memberikan penjelasan dalam pemahaman tentang pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, mempunyai manfaat secara praktis yang nantinya didapatkan dari hasil penelitian yang ditujukan untuk pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* guna dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam memberikan materi kepada peserta didik, khususnya pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*mixed method*), yaitu kombinasi metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Menurut Creswell, penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010). Adapun tipe penelitian kombinasi yang digunakan adalah *Sequential Exploratory Design*. *Sequential Exploratory Design* adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan metode kuantitatif secara berurutan (Sugiyono, 2011). Pada tahap pertama penelitian dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis data berupa kualitatif, kemudian pada tahap kedua mengumpulkan data kuantitatif. Berikut merupakan bagan dari *Sequential Exploratory Design*.



Gambar 1. *Sequential Exploratory Design*
(Diadaptasi dari Creswell dan Plano dalam Frenkel, 2015).

Penelitian ini dimulai dengan observasi dan wawancara terhadap guru dan kemudian dilanjutkan dengan pembagian kuesioner kepada peserta didik. Maka, model penelitian ini adalah *Sequential Exploratory Design*. Hal ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana problematik yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya, sehingga perlu adanya tindakan observasi atau pengamatan guna menemukan pemahaman problematik yang terjadi dalam proses pembelajaran *hybrid learning* pada mata pelajaran PPKn yang diterapkan di SMA Negeri 16 Surabaya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan melalui wawancara kepada guru mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya, sedangkan data

sekunder yang dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada peserta didik dari jenjang kelas X MIPA 2, XI MIPA 7, dan XII MIPA 4 SMA Negeri 16 Surabaya. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 16 Surabaya yang terletak di Jl. Raya Prapen, Surabaya dikarenakan terdapat penerapan pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Hal ini didukung dengan kondisi lingkungan di SMA Negeri 16 Surabaya yang terlihat kondusif, dengan demikian lingkungan tersebut mendukung untuk terlaksananya kegiatan belajar mengajar. Adapun waktu penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian *ex post facto*.

Dalam penelitian ini berfokus pada problematik yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya. Pada penelitian ini difokuskan pada problematik yang dialami oleh guru mata pelajaran PPKn dalam menyampaikan materinya kepada peserta didik, serta penelitian ini juga difokuskan pada problematik yang dialami oleh peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru, khususnya pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya. Maka, dalam penelitian ini dapat diketahui kesetaraan yang terjadi mengenai problematik dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya.

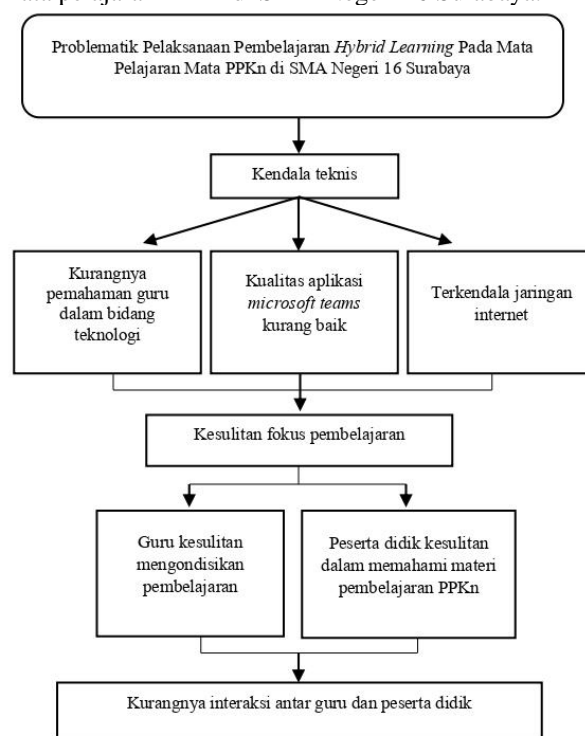
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner, adapun instrumen penelitian yang diteliti terkait hal-hal dalam pembelajaran *hybrid learning*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan kuesioner. Dalam penelitian ini, terdapat hal-hal yang perlu diobservasi adalah proses kegiatan belajar mengajar dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya. Dalam wawancara yang dilakukan, terdapat dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dalam penelitian ini peneliti adalah orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu guru mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya. Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah kuesioner. Berdasarkan fokus penelitiannya, maka terdapat kuesioner atau angket sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner atau angket terbuka, dimana pada kuesioner ini terdapat beberapa pernyataan terkait pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yang akan disebar ke masing-masing jenjang kelas X, XI, dan XII SMA Negeri 16 Surabaya, kemudian dari hasil kuesioner akan digeneralisasikan menjadi data kuantitatif yang selanjutnya dapat disesuaikan dengan penjelasan berdasarkan hasil wawancara yang didapat melalui guru mata pelajaran PPKn yang dituliskan berupa deskripsi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data tersebut dikarenakan untuk mengetahui proses kegiatan belajar mengajar yang diterapkan di SMA Negeri 16 Surabaya.

Dalam melakukan teknik analisis data, dapat dilakukan melalui tahap: (1) Pengumpulan data yang didapat di SMA Negeri 16 Surabaya; (2) Reduksi data yang dilakukan untuk memfokuskan pada hal-hal yang penting terkait dengan pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* dalam

mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya; (3) Penyajian data melalui hasil pencatatan dalam melakukan wawancara terkait dengan pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* dalam mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya, kemudian data disusun secara sistematis dalam bentuk deskripsi; (4) Penyimpulan data dari adanya pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* dalam mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

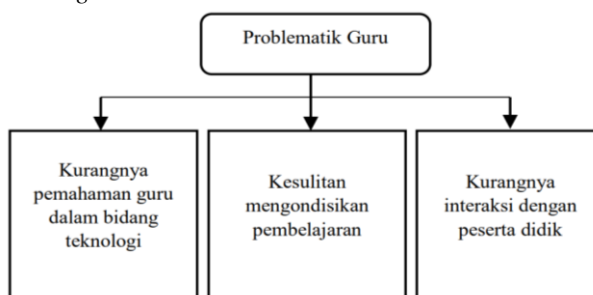
Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan kuesioner data terkait adanya problematik yang setara yang dialami oleh guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya.



Gambar 2.
Problematic Pelaksanaan Pembelajaran *Hybrid Learning* Pada Mata Pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya.

Problematic Guru

Pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* merupakan pengalaman baru bagi para pendidik. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari guru mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya, dapat diketahui bahwa guru mengalami problematik dalam pembelajaran *hybrid learning*.



Gambar 3.
Problematic Guru

Adapun problematik yang dihadapi oleh guru mata pelajaran PPKn dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* adalah kurangnya pengetahuan guru dalam bidang teknologi. Dapat diketahui sebelumnya, dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 16 Surabaya menyediakan prasarana aplikasi *microsoft teams*, dimana *microsoft teams* merupakan wadah yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Hal ini menjadi sebuah problematik bagi guru yang lanjut usia, dimana terdapat banyak guru di SMA Negeri 16 Surabaya yang sudah lanjut usia, khususnya guru mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya memiliki tiga guru, dengan dua guru yang sudah lanjut usia, dan satu guru yang masih muda.

Adanya penggunaan *microsoft teams* yang digunakan sebagai wadah dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*, hal ini dapat menimbulkan problematik tersendiri bagi guru dikarenakan kurangnya pengetahuan guru dalam bidang teknologi. Maka, dalam penggunaan *microsoft teams*, faktor kemampuan guru dalam mengoperasikan *microsoft teams* masih kurang. Dalam penggunaan *microsoft teams* di SMA Negeri 16 Surabaya memiliki tim IT sebagai pengelola *microsoft teams*. Dengan demikian, yang menyiapkan dan mengontrol penggunaan *microsoft teams* adalah tim IT, dimana tim IT merupakan guru mata pelajaran TIK dan prakarya di SMA Negeri 16 Surabaya, sehingga tim IT sekolah memiliki tanggung jawab dalam penggunaan dan pengoperasian *microsoft teams*. Sebagai tindak lanjutnya dalam penggunaan *microsoft teams* yang dilaksanakan dalam pembelajaran *hybrid learning*, tim IT memberikan arahan dan cara kepada seluruh guru dalam penggunaan dan teknik bekerja dari aplikasi *microsoft teams*. Dengan demikian dalam penggunaannya, guru hanya sebatas menggunakan dengan cara dan teknik yang telah disampaikan oleh tim IT SMA Negeri 16 Surabaya. Dalam hal ini guru adanya problematik guru dalam bidang teknologi membuat guru kesulitan dalam beradaptasi dengan aplikasi *microsoft teams* yang digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan *hybrid learning*. Namun, jika platform terdapat kendala dalam penggunaan *microsoft teams* ketika mengajar, maka kendala tersebut dikembalikan lagi kepada tim IT sekolah. Hal ini dapat diketahui melalui pendapat salah satu guru mata pelajaran PPKn sekaligus Waka Kesiswaan SMA Negeri 16 Surabaya yaitu Tri Mintaju yang menyatakan pendapatnya terkait penggunaan *microsoft teams* bahwasannya:

“Dalam penggunaan *microsoft teams* yang menguasai dan menyiapkan adalah tim IT dari sekolah kami, jadi kita hanya sebatas menggunakan dengan cara dan teknik yang telah disampaikan dengan tim IT sekolah. Jika terdapat kendala, kita kembalikan di tim IT.” (Wawancara TM, 2021).

Hal ini menyebabkan guru kurang otonom dalam pembelajaran *hybrid learning*, dikarenakan guru memiliki keterbatasan dan kurang menguasai dalam bidang teknologi, sehingga guru bergantung pada tim IT sekolah. Dengan demikian, guru mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan teknologi dalam sebuah pembelajaran,

sehingga guru kurang terbiasa mengaplikasikan dalam pembelajaran, seperti penggunaan *microsoft teams* itu sendiri. Guru tidak lagi memanfaatkan *microsoft teams* sebagai wadah dalam pembelajarannya, padahal melalui *microsoft teams* peserta didik yang melaksanakan PJJ dapat menerima materi pembelajaran pada saat itu. Namun dapat kita ketahui sebelumnya, guru memiliki keterbatasan pengetahuan dalam bidang teknologi, sehingga peserta didik yang melaksanakan PJJ kurang mendapatkan materi yang disampaikan oleh guru dikarenakan guru terfokus pada peserta didik yang melaksanakan PTM. Hal ini sejalan dengan pernyataan Moh. Najikh selaku guru mata pelajaran PPKn yang kesulitan dalam menguasai di bidang teknologi bahwasannya:

“Penggunaan *microsoft teams* saat ini pada pembelajaran *hybrid learning* saya lebih terfokus di PTM nya serta memberikan tugas, sedangkan untuk yang PJJ saya gunakan untuk pemberian tugas saja dan untuk penjelasannya saya jelaskan di pertemuan selanjutnya pada saat PTM. Jadi, bedanya untuk PTM lebih dulu mendapatkan materi, dan materi yang disampaikan tetap sama.” (Wawancara MN, 2021).

Dalam pernyataannya tersebut, peserta didik yang melaksanakan PJJ hanya melakukan pendalaman materi sendiri melalui belajar secara individu di rumah tanpa mendapatkan penjelasan materi dari guru. Adanya problematik guru yang kesulitan dalam mengaplikasikan teknologi ternyata berpengaruh pada fokus pembelajaran yang menyebabkan guru mengalami kesulitan fokus dalam pembelajaran, hal ini menjadi problematik guru dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Dalam penyampaian materi pembelajaran melalui pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*, terdapat kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru dalam bidang teknologi yang menyebabkan guru tidak fokus dalam mengajar secara *hybrid learning*. Hal ini dapat diketahui bahwa guru mata pelajaran PPKn lebih fokus pada peserta didik yang melakukan PTM daripada peserta didik yang melakukan PJJ, sehingga sering kali peserta didik yang melaksanakan PJJ sering terabaikan, bahkan guru tidak mengadakan PJJ dalam penyampaian materi pembelajarannya, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Moh. Najikh dan ditambahkan oleh pendapat Tri Mintaju selaku guru mata pelajaran PPKn bahwasannya:

“Dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* terfokuskan pada PTM untuk dapat bisa memaksimalkan pembelajaran, jadi yang PJJ hanya penugasan saja. Karena dengan PJJ sendiri kita relatif sulit untuk mengondisikan, sehingga dapat memanfaatkan waktu PTM-nya. Karena jika kita membagi konsentrasi dengan PJJ, maka waktu yang PTM ini tidak efektif.” (Wawancara TM, 2021).

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yang dilakukan oleh guru mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya diketahui bahwa pada saat pembelajaran, guru menjelaskan materi PPKn kepada peserta didik yang melakukan PTM, sedangkan dari peserta didik yang melakukan PJJ diberi tugas dan akan

dijelaskan kembali ketika peserta didik melakukan PTM pada pertemuan berikutnya. Hal ini dilakukan oleh guru dikarenakan guru sulit mengontrol peserta didik pada saat PJJ, sehingga guru lebih fokus dan memanfaatkan penyampaian materinya pada saat PTM, karena beberapa dari peserta didik yang PJJ sulit untuk bergabung karena terkendala jaringan, kendala *microsoft teams* atau kendala di rumah lainnya. Hal ini dapat diketahui bahwa sering kali peserta didik yang PJJ tidak menampilkan wajah atau *oncamera* pada saat pembelajaran berlangsung dan tidak merespon guru pada saat guru menanyakan materi yang disampaikan, seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu guru mata pelajaran PPKn yaitu Novia Rahmawati bahwasannya:

“Pada pembelajaran *hybrid learning*, saya lebih memfokuskan pada PTM. Karena kita harus memanfaatkan moment dalam memberikan materi kepada peserta didik, dan juga jika peserta didik yang melakukan PJJ, kita tidak sepenuhnya tau apakah dia mengikuti pembelajaran dan benar-benar memperhatikan kita atau sekedar join saja.” (Wawancara NR, 2021).

Adanya kesulitan guru dalam mengontrol peserta didik dalam penyampaian materinya khususnya pada peserta didik yang melakukan PJJ dan hanya fokus ke peserta didik yang melakukan PTM, hal ini menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda dari guru dalam menyampaikan materinya, sehingga menjadi sebuah problematik bagi guru karena guru tidak bisa berlaku adil dan guru menjadi tidak seimbang dalam memberikan fokus perhatian kepada peserta didik.

Dengan demikian, adanya pengaruh guru pada fokus pembelajaran dalam menyampaikan materinya menjadi tidak tuntas, dikarenakan guru lebih fokus kepada peserta didik yang melakukan PTM daripada ke peserta didik yang melakukan PJJ. Hal ini menyebabkan kurangnya interaksi dalam pembelajaran dua arah tersebut yaitu interaksi antara guru dan peserta didik menjadi terbatas, sehingga hal ini sulit untuk dilaksanakan secara koheren dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Pada dasarnya telah diketahui bersama bahwa dalam pendidikan harus mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Adanya interaksi antara guru dan siswa menjadi penting dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Hal ini didukung dengan pendapat Inah, bahwasannya dalam dunia pendidikan proses pembelajaran akan efektif jika komunikasi dan interaksi antara guru dengan peserta didik dapat terjadi secara intensif (Inah, 2015).

Dalam sebuah pembelajaran, adanya tujuan pembelajaran menurut Aprida Pane adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran (Pane & Dasopang, 2017). Dalam hal ini sebagai guru memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan materinya, namun jika terdapat problematik pada penyampaian materi dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*, seperti kurangnya pengetahuan guru dalam bidang teknologi khususnya aplikasi *microsoft teams* yang digunakan sebagai wadah dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya menyebabkan guru kurang fokus dalam pembelajarannya, dimana guru fokus

menyampaikan materi kepada peserta didik yang melakukan PTM daripada ke peserta didik yang melakukan PJJ. Hal ini seperti pernyataan yang disampaikan oleh Moh. Najikh bahwasannya:

“Karena jika kita membagi konsentrasi dengan PJJ, maka waktu yang PTM ini tidak efektif. Maka, untuk yang PTM-nya kita sampaikan materi, sehingga pendalaman materinya semakin baik. Disamping itu, PJJ juga nantinya akan mendapatkan penjelasan materi di pertemuan selanjutnya ketika melaksanakan PTM. Sehingga PJJ diberikan tugas untuk dibahas di pertemuan selanjutnya.” (Wawancara MN, 2021).

Hal ini dapat menjadi problematik bagi guru dikarenakan tidak bisa menyampaikan materi secara keseluruhan kepada seluruh peserta didik jika peserta didik tidak dapat menerima dan memahami materi dengan baik, sehingga hal ini dapat menimbulkan tidak tercapainya sebuah tujuan pembelajaran dengan baik.

Problematic Peserta Didik

Adanya pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* juga merupakan hal baru bagi para peserta didik. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 90 peserta didik dengan perwakilan satu kelas per jenjang kelasnya. Adapun kuesioner dibagikan ke kelas X MIPA 2, XI MIPA 7, dan XII MIPA 4. Kuesioner yang dibagikan terkait dengan problematik dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya, sehingga hal ini sesuai dengan fokus penelitian yang dapat diketahui bahwa peserta didik mengalami problematik dalam pembelajaran *hybrid learning*.

Adapun problematik yang dialami oleh peserta didik dapat diketahui dari hasil kuesioner yang diperoleh bahwasannya terdapat lima indikator problematik dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Adapun diantaranya dapat dilihat pada tabel 1.

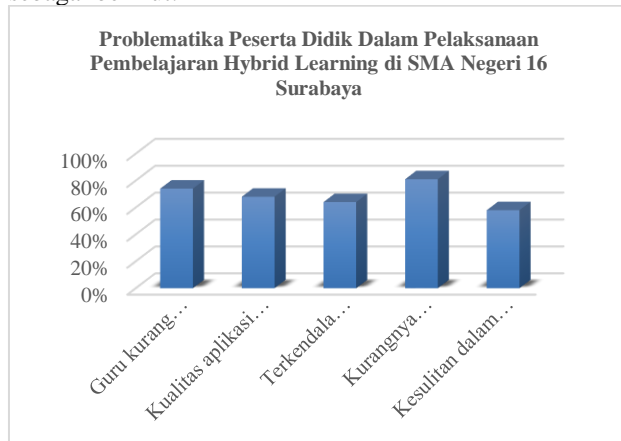
Tabel 1. Problematic Peserta Didik

Problematic <i>Hybrid Learning</i>	Jumlah Jawaban Ya	%
Guru kurang mengondisikan pembelajaran	67	74%
Kualitas aplikasi <i>microsoft teams</i> kurang baik	61	68%
Terkendala jaringan internet ketika PJJ	58	64%
Kurangnya interaksi dengan guru	73	81%
Kesulitan dalam memahami materi pembelajaran PPKn	52	58%

Sumber: Hasil kuesioner kepada 90 peserta didik di SMA Negeri 16 Surabaya pada kelas X MIPA 2, XI MIPA 7, dan XII MIPA 4

Berdasarkan pada tabel 1, dapat diketahui dari 90 peserta didik yang menjadi responden pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat 67 peserta didik yang menilai bahwa guru kurang mengondisikan pembelajaran dengan hasil persentase 74%, 61 peserta didik menilai bahwa kualitas *microsoft teams* kurang baik dengan hasil persentase 68%, terdapat 58 peserta didik yang terkendala jaringan internet pada saat PJJ memperoleh hasil

persentase 64%, 73 peserta didik merasakan kurangnya interaksi dengan guru memperoleh hasil persentase 81% dan terdapat 52 peserta didik yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran memperoleh hasil persentase 58%. Dengan demikian dari hasil kuesioner yang didapatkan, maka hasil dapat diolah sebagai berikut:



Gambar 4.
Problematik Peserta Didik

Sumber: Hasil pengolahan Ms. Excel dari perolehan hasil kuesioner

Dapat dilihat dari gambar 4, berdasarkan hasil perhitungan persentase yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan ke peserta didik diketahui adanya problematik yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* menunjukkan (1) Terdapat 74% peserta didik yang menilai bahwa guru kurang mengondisikan pembelajaran. Problematik ini memiliki hasil persentase yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan pada saat pembelajaran *hybrid learning* berlangsung, guru hanya memfokuskan pada peserta didik yang melakukan PTM, dan peserta didik yang melakukan PJJ sering kali terabaikan, bahkan PJJ ditiadakan atau peserta didik diberi tugas untuk dikerjakan pada saat itu dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* ketika PJJ dengan menggunakan sarana aplikasi *microsoft teams* ini, dapat dilihat guru memiliki pemahaman yang kurang dalam bidang teknologi. Dengan melihat guru kurang memiliki pemahaman yang kurang dalam bidang teknologi, menyebabkan peserta didik menilai bahwa guru kurang mengondisikan pembelajaran. Terdapat salah satu peserta didik dari kelas XII MIPA 4 yang merupakan ketua OSIS Periode 2021 yaitu Ares mengemukakan pendapatnya bahwasannya:

“Guru-guru mengalami *Culture Shock*, susah menerima keadaan sehingga kurang komunikatif dengan peserta didik. Harapannya, sekolah dapat membenahi SDM Guru terlebih dahulu.” (Kuesioner Terbuka AF, 2022).

Adanya guru yang kurang memiliki pengetahuan dalam bidang teknologi merupakan salah satu problematik yang cukup signifikan dalam sebuah pembelajaran, karena guru yang menyampaikan dan menjelaskan materi kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat menerima dan memahami materi dari guru. Namun ketika guru tidak dapat menjelaskan secara keseluruhan kepada peserta

didik, sehingga guru kurang dapat mengondisikan pembelajaran, maka sebuah pembelajaran jika tidak diterima dengan baik oleh peserta didik dapat membuat sebuah tujuan pembelajaran akan sulit tercapai.

Disamping itu, sekalipun guru mengadakan PJJ dalam pembelajaran *hybrid learning*, dalam penggunaan aplikasi sebagai prasarana penunjangnya, dapat diketahui dari hasil yang diperoleh menunjukkan (2) 68% kualitas *microsoft teams* yang kurang baik. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa masalah pada aplikasi *microsoft teams* seperti kualitas video yang buruk, suara guru kurang terdengar jelas, hingga *microsoft teams* yang sering error dan tiba-tiba mati. Hal ini seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Laisya dari kelas XII MIPA 4 bahwasannya:

“Dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* dengan menggunakan media aplikasi *microsoft teams* kualitas video *microsoft teams* buruk, dan suara kurang terdengar jelas bahkan *microsoft teams* tiba-tiba mati.” (Kuesioner Terbuka LH, 2022).

Dengan demikian, hal ini menjadi problematik dalam pembelajaran *hybrid learning*, dikarenakan peserta didik yang melakukan PJJ hanya dapat menerima materi pembelajaran PPKn melalui aplikasi *microsoft teams* tersebut sebagai wadah dalam penyampaian materi oleh guru yang disediakan sekolah sebagai prasarana dalam pembelajaran *hybrid learning*. Adanya kualitas aplikasi *microsoft teams* yang kurang baik juga disebabkan oleh kendala dari jaringan internet yang dilakukan oleh peserta didik dalam PJJ ketika pembelajaran *hybrid learning* berlangsung. Hal ini dapat diketahui dari hasil persentase yang menunjukkan (3) 64% peserta didik mengalami kendala jaringan internet ketika PJJ. Dari adanya hasil persentase yang diperoleh, banyak peserta didik yang mengalami kendala internet yang membuat mereka kehilangan konsentrasi ketika guru menjelaskan materi bahkan peserta didik merasa bosan, jenuh, mengantuk dan tidak semangat ketika pembelajaran *hybrid learning* berlangsung. Hal ini sejalan dengan pendapat Aldo dari kelas X MIPA 2, bahwasannya:

“Ketika PJJ dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* sering terkendala jaringan internet, karena peserta didik belajar dengan menggunakan *microsoft teams* sehingga peserta didik sulit untuk berkonsentrasi.” (Kuesioner Terbuka AH, 2021).

Dari adanya problematik tersebut, ternyata hal ini juga menimbulkan kurangnya interaksi dengan guru. Hal ini dapat diketahui dari hasil persentase yang menunjukkan bahwa (4) terdapat 81% peserta didik yang kurang berinteraksi dengan guru. Kurangnya interaksi dengan guru dapat menimbulkan kesalahpahaman peserta didik dalam menerima materi pembelajaran, sehingga materi yang diterima tidak utuh dan menyebabkan persepsi atau pemahaman yang diterima peserta didik berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Kania yang merupakan salah satu peserta didik kelas XII MIPA 4 bahwasannya:

“Ketika PJJ pada mata pelajaran PPKn dalam pembelajaran *hybrid learning* berlangsung, ketika ada yang ingin ditanyakan mengenai kunci jawaban yang salah terkait materi yang diberikan, namun

guru merasa bahwa jawabannya benar sehingga terjadi *lost communication* mengenai kebenaran materi tersebut". (Kuesioner Terbuka KSR, 2022).

Dengan demikian, hal ini menyebabkan kesalahpahaman materi antara guru dengan peserta didik, karena pada dasarnya suatu pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik (Anggraeni, 2019). Adanya problematik yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* khususnya pada peserta didik yang melakukan PJJ, mulai dari guru lebih fokus ke peserta didik yang melakukan PTM sehingga sulit untuk mengondisikan peserta didik yang melakukan PJJ, kemudian peserta didik yang mengalami jaringan internet yang kurang stabil, kualitas video *microsoft teams* yang kurang baik, hingga menimbulkan kurangnya interaksi dengan guru. Dengan demikian, dari beberapa problematik yang ada, ternyata beberapa problematik tersebut banyak dialami oleh peserta didik yang melakukan PJJ. Dari adanya problematik yang telah disebutkan, beberapa problematik tersebut sangat berpengaruh pada tingkat pemahaman materi pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*, sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami materi pembelajaran PPKn yang dilakukan melalui pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Maka, dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada peserta didik menunjukkan hasil persentase (5) 58% peserta didik yang kesulitan dalam memahami materi pembelajaran PPKn. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rajni yang merupakan salah satu peserta didik dari kelas XII MIPA 4 bahwasannya:

"*Hybrid learning* yang diterapkan, kurang terealisasi dengan baik, dikarenakan terdapat beberapa guru yang tidak melakukan pembelajaran *hybrid learning* tetapi hanya satu arah (PTM), sehingga yang melaksanakan PJJ hanya mendapatkan materi dari PTM yang di sekolah. Maka, sulit untuk memahami materi." (Kuesioner Terbuka RY, 2022).

Dengan demikian, dalam sebuah pembelajaran dikatakan berhasil apabila tujuan pembelajaran tersebut tercapai. Adanya tujuan pembelajaran tercapai ketika peserta didik dapat memahami materi yang diberikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran merupakan hal yang sangat pokok dalam sebuah pendidikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Apride Pane bahwasannya tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam sebuah proses pembelajaran (Pane & Dasopang, 2017). Adanya keberhasilan pembelajaran dapat tercapai apabila pembelajaran dilaksanakan secara efektif dan peserta didik mampu memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran yang digunakan sebagai tolok ukur pembelajarannya.

Pembahasan

Adanya pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya merupakan implementasi yang telah dilakukan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021, dikarenakan

terdapat fungsi implementasi yang mencakup sistem penyampaian penerusan kebijakan, dimana dalam penelitian ini disebut dengan teori *policy delivery system*. Dengan demikian, adanya realisasi teori *delivery system* ini konteksnya adalah menyampaikan.

Hal ini dapat diketahui melalui realisasi yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 16 Surabaya bahwasannya terdapat penyampaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, dan diinstruksikan oleh Mendagri kepada Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya terkait kebijakan pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* pada Nomor 35 Tahun 2021 yang kemudian dipetakan berdasarkan kriteria daerah sebagai penyelenggara kebijakan yaitu tersampainya pada kepala sekolah yang berada di zona level tiga, salah satunya adalah SMA Negeri 16 Surabaya. Dengan adanya suatu kebijakan yang telah dikeluarkan, dapat menjadi solusi guna bertujuan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Reza Pahlefi dan Zainal Hidayat (2015) tentang teori *policy delivery system* bahwasannya dalam implementasi mencakup terbentuknya *policy delivery system*, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan (Pahlevi & Hidayat, 2015). Namun, adakalanya sebuah kebijakan pendidikan yang dijalankan pasti berdampak pada pembelajarannya itu sendiri, seperti kebijakan pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya, yang memiliki beberapa problematik dalam pelaksanaannya.

Adanya problematik-problematik yang telah disebutkan dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*, dapat diketahui bahwa pada dasarnya problematik mempunyai sifat pokoknya yaitu negatif, yang berarti menghambat untuk mencapai suatu tujuan. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa problematik dalam dunia pendidikan pasti ada, dimana dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari sebuah pembelajaran. Adanya prolematika dalam dunia pendidikan juga sering terjadi, sebagai contoh nyatanya pembelajaran *hybrid learning* yang telah diketahui terdapat beberapa kendala yang menjadi sebuah problematik dari dampak Covid-19 di bidang pendidikan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya, dapat memberikan pengalaman baru bagi para pelaksana pembelajar dalam sebuah pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yang dilaksanakan dengan menggabungkan antara pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka dalam waktu yang bersamaan. Maka, pembelajaran *hybrid learning* dapat dijadikan sebagai sebuah solusi dalam pembelajaran. Pembelajaran *hybrid learning* yang sebelumnya tidak pernah dilakukan sehingga hal ini bukanlah hal yang mudah bagi guru dan peserta didik untuk dilakukan dalam sebuah pembelajaran. Namun kita tetap mengacu pada sistem pendidikan nasional dimana peserta didik berhak untuk menerima materi pembelajaran dengan program wajib belajar 12 tahun yang sesuai dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 sehingga peserta didik diharuskan untuk dapat melakukan sebuah pembelajaran. Dengan dilaksanakan pembelajaran *hybrid*

learning ini ternyata dapat menyebabkan adanya problematik baru yang muncul dalam sebuah pembelajaran khususnya pada guru dan peserta didik. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, maka dapat diketahui problematik yang dialami oleh guru mata pelajaran PPKn dan problematik yang dialami oleh peserta didik di SMA Negeri 16 Surabaya, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Problematik Guru dan Peserta Didik Dalam Pelaksanaan Pembelajaran *Hybrid Learning*

Problematik Guru	Problematik Peserta Didik
Kurangnya pemahaman guru dalam bidang teknologi	Kualitas aplikasi <i>microsoft teams</i> kurang baik
	Terkendala jaringan internet ketika PJJ
Kesulitan fokus pembelajaran	Guru kurang mengondisikan pembelajaran
	Kesulitan dalam memahami materi pembelajaran PPKn
Interaksi guru dan peserta didik kurang maksimal	Kurangnya interaksi dengan guru

Sumber: Perolehan hasil penelitian

Berdasarkan pada tabel 2, dapat dirumuskan sebuah problematik yang setara yang dialami oleh guru dan peserta didik pada mata pelajaran PPKn dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya. Tiga indikator yang ditemukan dari adanya problematik yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yang saling berkaitan antara guru dan peserta didik. Adapun problematik pertama adalah terdapat pada kendala teknis dalam penggunaan *microsoft teams* guru dan peserta didik mengalami problematik tersendiri namun keduanya saling berkaitan. Dapat diketahui sebelumnya, bahwasannya SMA Negeri 16 Surabaya menyediakan prasarana aplikasi *microsoft teams* sebagai wadah dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Dalam penggunaan *microsoft teams* yang merupakan aplikasi yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajarannya kepada peserta didik, sehingga guru dituntut untuk dapat memanfaatkan prasarana dalam menyampaikan pembelajarannya dengan menggunakan aplikasi *microsoft teams* tersebut, karena *microsoft teams* juga merupakan rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*.

Dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yang dilaksanakan dengan menggabungkan antara pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka dalam waktu yang bersamaan, sehingga guru dituntut untuk mempelajari bagaimana sistem pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* dengan menggunakan *microsoft teams* sebagai medianya. Dalam penggunaan *microsoft teams* di SMA Negeri 16 memiliki tim IT sebagai pengelola *microsoft teams*, sehingga tim IT sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengontrol, dan penggunaan *microsoft teams* ini yang menyiapkan adalah tim IT. Setelah itu, guru diberikan arahan tentang tata cara dan teknik dalam penggunaan *microsoft teams*. Namun,

jika *microsoft teams* mengalami kendala, maka dikembalikan lagi ke tim IT sekolah.

Dalam hal ini ternyata dapat menyebabkan problematik tersendiri bagi guru yang telah lanjut usia, karena tidak semua guru memiliki pengetahuan dalam bidang teknologi sehingga guru kesulitan dalam beradaptasi menggunakan *microsoft teams* dengan baik, maka dapat diketahui bahwasannya banyak guru yang kurang memahami pengetahuan dalam bidang teknologi dan guru menjadi kurang otonom dikarenakan guru bergantung pada tim IT yang disediakan oleh sekolah. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya guru mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya memilih tiga guru PPKn, diantaranya terdapat dua guru yang sudah lanjut usia, dan satu guru yang masih muda. Dari adanya problematik terkait kurangnya pemahaman guru dalam bidang teknologi, hal ini menjadi faktor yang sangat krusial terjadi dalam meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia. Dengan demikian sebagai pendidik harus melakukan pengembangan diri, seperti yang telah kita ketahui bahwa guru adalah penopang pendidikan bagi para peserta didik dalam menghadapi kehidupan yang lebih baik. Rohmadi berpendapat bahwa seorang guru harus dapat melahirkan manusia yang mampu melakukan hal-hal yang baru, tidak hanya sekedar mengulang apa yang dilakukan generasi sebelumnya, sehingga manusia dapat menjadi lebih kreatif, penemu, penjelajah, cerdas dan berkarakter (Romadi, 2013). Dengan begitu guru sebagai contoh pembelajar dituntut untuk lebih kreatif dalam menyampaikan materi pembelajarannya supaya kegiatan belajar mengajar dapat lebih efektif dan peserta didik dapat menerima dan memahami materi pembelajaran dengan baik, misalnya dalam menyampaikan materi melalui pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya. Maka sebagai guru harus dapat memahami bagaimana sistem pembelajaran *hybrid learning* itu sendiri, khususnya guru harus dapat melihat peluang dengan baik terkait penyampaian yang baik dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Seperti halnya guru dapat mengetahui bagaimana teknik dan cara kerja dari media prasarana yang disediakan oleh sekolah yaitu adanya aplikasi *microsoft teams*, menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik dalam pembelajaran *hybrid learning* dan guru juga harus memahami metode apa yang harus dilaksanakan supaya pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Dengan begitu, guru harus dapat beradaptasi dengan aplikasi *hybrid learning*.

Terlebih lagi, guru juga harus mengetahui karakteristik sikap dan moral peserta didik dalam kehidupan sehari-hari khususnya di sekolah. Adanya tujuan pembelajaran PPKn diajarkan di sekolah yaitu untuk mewujudkan generasi muda sebagai warga negara yang sadar akan kewajibannya dalam bela negara dengan berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jatidiri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa (Kusman, 2020). Dengan demikian, pembelajaran PPKn sangat sulit diajarkan jika hanya melalui PJJ. Dikarenakan karakteristik pembelajaran PPKn tidak hanya tentang materi dan teori saja, melainkan guru juga harus melihat

karakter, norma, moral, dan sikap peserta didik dalam implementasi di dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai dan norma yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka, perlunya pembelajaran *hybrid learning* untuk dilakukan guna bertujuan supaya guru dapat memantau dan melihat sikap dan perilaku perkembangan peserta didik dalam lingkungan sekolah pada saat PTM berlangsung.

Dalam sebuah pembelajaran yang telah dirancang dan direncanakan sebaik mungkin oleh para pendidik khususnya pada pembelajaran *hybrid learning*, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah problematik datang pada peserta didik. Pada dasarnya peserta didik adalah salah satu komponen penting dalam pendidikan, tanpa peserta didik sebuah proses pendidikan tidak akan terlaksana. Pada hakikatnya, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang dan secara pribadi dan dapat mengembangkan potensinya melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu.

Adanya problematik yang datang pada peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya, seperti kualitas *microsoft teams* yang kurang baik. Hal ini juga dikarenakan adanya kendala jaringan internet dan koneksi sinyal yang buruk ketika pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* berlangsung, sehingga menyebabkan kualitas video pada *microsoft teams* buruk, suara guru yang menjelaskan kurang jelas, hingga *microsoft teams* yang sering eror dan tiba-tiba mati. Hal tersebut dirasakan oleh peserta didik yang melaksanakan PJJ. Dengan begitu, peserta didik yang melaksanakan PJJ mengalami problematik dalam penggunaan *microsoft teams*, terlebih lagi terdapat gangguan ketika di rumah serta guru lebih fokus pada peserta didik yang melaksanakan PTM. Adanya situasi ini terjadi pada kendala psikologis peserta didik yang menyebabkan peserta didik tidak fokus ketika di rumah, sehingga dapat memunculkan rasa malas, mengantuk dan tidak konsentrasi pada pembelajaran. Hal ini nantinya dapat menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran PPKn.

Setelah adanya problematik dalam penggunaan *microsoft teams* yang dialami oleh guru dan peserta didik, maka adapun problematik kedua yang dapat memicu kendala psikologis pada guru dan peserta didik, yaitu guru dan peserta didik mengalami kesulitan fokus pembelajaran. Adanya kesulitan fokus pembelajaran ini datang pada problematik yang dialami oleh guru, dimana guru kurang dapat mengondisikan peserta didik yang terbagi menjadi PTM dan PJJ dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Dari hasil yang telah diperoleh bahwasannya dalam menyampaikan materinya guru lebih fokus pada peserta didik yang melaksanakan PTM, dan peserta didik yang melaksanakan PJJ sering kali terabaikan dan hanya diberi penugasan saja, atau bahkan PJJ tersebut ditiadakan.

Dalam hal ini guru memanfaatkan waktu PTM untuk menyampaikan materi secara langsung, hal ini dikarenakan sering kali peserta didik ketika PJJ masih kurang merespon. Maka hal ini menjadi penyebab guru

memaksimalkan menyampaikan materinya kepada peserta didik sebagai solusinya, karena dirasa jika menyampaikan materi kepada seluruh peserta didik yang melakukan PTM dan PJJ tidak bisa maksimal, sehingga menyebabkan fokus penyampaian guru menjadi terpecah dan guru sulit untuk mengontrol peserta didik, terlebih lagi jika guru melakukan PJJ saat pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* dimana guru kesulitan mengaplikasikan *microsoft teams* sehingga terjadi kendala pada guru yang membuat guru merasa fokusnya terpecah sehingga guru menjadi emosi, malas dalam pelaksanaan PJJ.

Dengan begitu hal ini berdampak pada peserta didik, dimana guru menjadi tidak seimbang dalam memberikan fokus perhatian kepada peserta didik. Hal ini ternyata juga sangat mempengaruhi belajar peserta didik, khususnya pada peserta didik yang melaksanakan PJJ. Jika guru tetap melaksanakan PJJ, namun dalam pelaksanaan PJJ tersebut guru terfokus hanya pada PTM, dan didukung dengan jaringan internet yang kurang stabil yang membuat kualitas video *microsoft teams* buruk dan suara kurang jelas, membuat peserta didik menjadi tidak memperhatikan materi, malas belajar, bosan dan mengantuk, atau bahkan mungkin terdapat kendala di rumah. Maka, dalam hal ini kendala psikologis juga datang pada peserta didik.

Dengan demikian hal ini dapat menjadikan sebuah problematik, karena sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan materi kepada peserta didik, sehingga guru seharusnya dapat memberikan fokus dan perhatian yang sama kepada peserta didik dan guru harus bisa bersikap adil dalam menyampaikan materinya kepada seluruh peserta didik yang melaksanakan PTM maupun PJJ pada pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Namun dalam hal ini jika guru tidak bisa memberikan materi pembelajaran secara utuh kepada peserta didik maka sebuah pembelajaran menjadi tidak tuntas.

Setelah adanya problematik mengenai kendala kesulitan fokus pembelajaran yang dialami oleh guru dan peserta didik, dalam problematik tersebut berdampak pada problematik ketiga yaitu kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik. Pada hakikatnya, dalam setiap kegiatan belajar mengajar melibatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik merupakan akibat dari problematik kesulitan fokus pembelajaran, dimana guru ketika menyampaikan pendapatnya ketika PJJ dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* menimbulkan adanya kesalahpahaman persepsi terkait pembelajaran pada mata pelajaran PPKn, dalam menerima materi pembelajaran, sehingga materi yang diterima tidak utuh dan menyebabkan persepsi atau pemahaman yang diterima peserta didik berbeda.

Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan dalam berkomunikasi satu sama lain. Dalam pembelajaran, guru mata pelajaran PPKn masih cenderung menggunakan metode pembelajaran konvensional yaitu ceramah. Menurut Suhartono berpendapat bahwa metode pembelajaran ceramah tidak efektif dan efisien untuk peserta didik dalam memahami materi pembelajaran PPKn (Suhartono, 2018). Terlebih lagi metode pembelajaran ceramah diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran

hybrid learning di SMA Negeri 16 Surabaya, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman persepsi materi yang disampaikan jika penyampaian materi yang disampaikan tidak dengan baik. Terlebih lagi dalam proses penyerapan pengetahuannya kurang ketika materi dijelaskan oleh guru, hal ini dikarenakan guru hanya fokus pada satu arah.

Kurangnya interaksi guru dengan peserta didik dalam pembelajaran *hybrid learning* khususnya pada peserta didik yang melakukan PJJ. Hal ini dapat menyebabkan peserta didik kesulitan dalam memahami materi pembelajaran PPKn, dikarenakan guru cenderung fokus pada peserta didik yang melaksanakan PTM, sehingga pemahaman materi yang diterima tidak utuh. Hal ini dapat menjadi problematik bagi guru dikarenakan tidak bisa menyampaikan materi secara keseluruhan kepada seluruh peserta didik jika peserta didik tidak dapat menerima dan memahami materi dengan baik, sehingga hal ini dapat menimbulkan tidak tercapainya sebuah tujuan pembelajaran dengan baik.

Dalam realisasi pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yang telah diterapkan di SMA Negeri 16 Surabaya, sehingga sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 35 Tahun 2021 terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Dengan adanya problematik-problematik yang telah disebutkan, hal ini sangat bergantung pada tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Maka, dalam hal ini terdapat fungsi pelaksanaan yang mencakup penerusan dalam ilmu kebijakan (*policy science*), sehingga disebut dengan adanya teori *policy delivery system* atau sistem penyampaian penerusan kebijakan dalam penelitian ini sudah sesuai. Dalam hal ini *policy delivery system* diartikan sebagai sistem penyampaian penerusan kebijakan.

Adapun realisasi teori *policy delivery system* dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yang telah dilakukan memiliki aspek-aspek yang dapat mempengaruhi jaringan kerja pada kebijakan penelitian ini, yaitu diantaranya (1) Pemerintah, disini pemerintah yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, Kemendikbud mengeluarkan suatu kebijakan melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 terkait pembelajaran tatap muka terbatas yang disampaikan kepada Gubernur dan Walikota Daerah; (2) Komunitas, yaitu SMA Negeri 16 Surabaya yang melaksanakan kebijakan sesuai dengan instruksi birokrasi. Adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Inmendagri dapat dilaksanakan oleh SMA Negeri 16 Surabaya, sehingga dalam penelitian ini terciptanya pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya. Setelah adanya pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya, ternyata terdapat problematik yang terjadi pada pembelajaran *hybrid learning*. Dengan adanya problematik yang terjadi, maka dapat disampaikan ke birokrasi untuk mendapatkan solusi dari problematik yang terjadi. Dengan demikian, hal ini dapat terjadi proses penyampaian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan terkait problematik guru dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* pada mata pelajaran PPKn di SMA Negeri 16 Surabaya, dapat diambil kesimpulan yaitu terdapat kendala teknis yang dialami oleh guru yaitu kurangnya pemahaman guru dalam bidang teknologi, dan kendala teknis yang dialami oleh peserta didik adalah kualitas aplikasi *microsoft teams* kurang baik serta terkendala jaringan internet. Hal ini dapat memunculkan kesulitan fokus pembelajaran pada guru adalah guru kesulitan mengondisikan pembelajaran, serta peserta didik kesulitan dalam memahami materi pembelajaran PPKn. Dari adanya beberapa problematik tersebut, hal ini dapat menyebabkan kurangnya interaksi antar guru dan peserta didik.

Dengan demikian, adanya problematik yang dihadapi oleh peserta didik dan guru mata pelajaran PPKn dalam pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* di SMA Negeri 16 Surabaya dapat diketahui sesuai dengan tujuan penelitian dalam rumusan masalah yang ada.

Saran

Dengan adanya problematik pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning* yang telah diketahui, maka perlu adanya evaluasi dari pelaksanaan pembelajaran *hybrid learning*. Dengan demikian pembelajaran dapat dipersiapkan dengan matang, seperti adanya kesiapan guru dalam memulai pembelajaran, sehingga guru diharuskan untuk menguasai teknologi dengan baik. Adanya kesiapan guru dalam menguasai dan mengondisikan pembelajaran supaya pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Maka, suatu pembelajaran dapat berjalan dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Tidak lupa peserta didik juga paham dengan tanggung jawabnya sebagai pelajar untuk selalu belajar dan diharapkan peserta didik untuk dapat memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan oleh guru.

Ucapan Terima Kasih

Dalam proses penelitian artikel ini, terimakasih kepada Bapak-Ibu guru dan teman-teman SMA Negeri 16 Surabaya yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan tempat serta mengizinkan untuk dijadikan penelitian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. E. (2019). *Strategi Pembelajaran Dengan Model Pendekatan Pada Peserta Didik Agar Tercapainya Tujuan Pendidikan Di Era Globalisasi*. ScienceEdu, 11(June), 72–79. <https://doi.org/10.19184/se.v2i1.11796>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dimiyati, & Mudjiono. (2010). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fanani, A., & Zaman, A. Q. (2021). *Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning Terhadap Hasil Belajar PPKn Siswa Kelas VII SMP Negeri 1*

- Sukodono. Pacivic: Jurnal Pendidikan Pancasila ..., 1(April), 11–20.
<http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/article/view/4252>
- Inah, E. nur. (2015). *Peran Komunikasi Dalam Interaksi Guru dan Siswa*. Al-Ta'dib, 8(2), 150–167.
- Kemendikbud. (2020). *Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)*. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, 021, 1–20.
- Kusman. (2020). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Generasi Muda Indonesia*. *Journal of Education Research*, 2(3), 32.
- Nasution, E. (2008). *Problematisasi Pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah IAIN Ambon*, 1–10.
- Pahlevi, M. F. R., & Hidayat, Z. (2015). *Implementasi Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Cuantrang di Kabupaten Rembang*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 14.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). *Belajar Dan Pembelajaran*. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333.
<https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i2.945>
- RI, M. D. N. (2021). *Salinan Imendagri Nomor 35 Tahun 2021*. 4(1), 6.
- RI, P. (2003). *Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [JDIH BPK RI]*. JDIH Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 37.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Romadi, M. (2013). *Menjadi guru Kreatif Inovatif, dan Inspiratif Menyongsong Kurikulum 2013 Tematik-Integratif*. 2013.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan*. CV. Alfabeta.
- Suhartono. (2018). *Identifikasi Kesulitan Guru PKn SMA di Wilayah Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Dalam Mengimplementasikan Strategi Pembelajaran Inovatif*. *Wahana*, 70(1), 35–37.
<https://doi.org/10.36456/wahana.v70i1.1565>
- Tri Susilo Repository, D., Universitas, R., & Jember, U. (2021). *Pengaruh Metode Pembelajaran (Inkuiri dan Resitasi) dan Gaya Belajar Kognitif Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 3 Sumber Jambe Jember Tahun Pelajaran 2015/2016*. In *Digital Repository Universitas Jember* (Issue September 2019).
- Verawati, & Desprayoga. (2019). *Solusi Pembelajaran 4.0: Hybrid Learning*. Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 2, 999–1015.
<https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/download/2739/2549>
- Wahab, S. . (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.